

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BERDASARKAN PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDY DI KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI



OLEH

SYAHRUL AMAN
NIM.10927006443

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

Panitia pengawas pemilihan Kota Pekanbaru dalam mengawasi jalannya pemilihan calon legislatif tidaklah semudah apa yang dikatakan, banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di lapangan, namun setiap ada pelanggaran yang terjadi sudah pasti menjadi tugas dari panwaslu dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut. Setelah laporan pelanggaran diterima, maka panwaslu mengadakan penyidikan terhadap laporan tersebut dan apabila terbukti maka pihak panwaslu akan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses agar dapat diberikan sanksi hukum yang patut dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu dalam mengawasi pemilu pada bakal calon legislatif berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru, serta apa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Panwaslu dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan legislatif berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada *Field Research*. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Maksud dari deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dalam hal ini tentang memberikan gambaran tentang tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan legislatif di Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kota Pekanbaru dalam pemilu legislatif yang akan dilaksanakan Tahun 2014 telah berjalan dimula dari pemantauan dan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilihan, persyaratan dan tata cara pencalonan, serta proses penetapan calon anggota DPRD Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya panwaslu Kota Pekanbaru telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa temuan dan laporan dari masyarakat yang berhubungan dengan persyaratan pencalonan anggota DPRD tetapi sifatnya hanya administratif dan tidak sampai kepada pelanggaran pidana, sehingga hanya diperbaiki saja terhadap kekurangan administrasi yang diperlukan oleh bakal calon anggota DPRD.

Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh anggota Panwaslu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya antara lain, adalah mengenai sulitnya untuk menertibkan baliho, stiker dan gambar yang telah dipasang oleh para caleg di sepanjang jalan di Kota Pekanbaru, sedangkan waktu kampanye baru akan dilaksanakan beberapa bulan kedepan. Kemudian juga masalah kekurangan biaya atau anggaran yang diperuntukkan bagi Panwaslu, pemerintah kota sering terlambat dalam melakukan pencairan anggaran, dengan demikian pelaksanaan pengawasan sampai ke tingkat kecamatan mengalami kendala,

karena para anggotanya sudah pasti memerlukan anggaran dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua, dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. HM. Nazir, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj.Nur'aini Sahu, SH.MH dan sekretaris jurusan Bapak Maghfirah, M.Ag, staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak M.Kastulani, SH. MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, September 2013

SYAHRUL AMAN
10927006443

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Karangka Tiori.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Kota Pekanbaru.....	23
B. Sejarah Panwaslu.....	28
C. Panitia Pengawas Pemilu Legislatif Kota Pekanbaru.....	29

BAB III : PANITIA PENGAWAS PEMILU LEGISLATIF

A. Tugas dan Wewenang Panwaslu.....	32
B. Hak dan Kewajiban Calon Legislatif.....	36

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kota Pekanbaru...	40
B. Hambatan Panwaslu Kota Pekanbaru dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang.....	52

C. Solusi Yang Dilakukan Oleh Panwaslu Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang.....	62
--	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan Reformasi sebagai langkah awal perbaikan dari otoritisme orde baru tidak hanya memiliki target untuk menghilangkan kekuasaan orde baru melainkan juga bertujuan untuk membangun Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Setelah Soeharto tumbang pembedahan terhadap system pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan antara lain meliputi wacana pemilihan kepala pemerintahan dan juga lembaga legislatif yang dilaksanakan dengan melalui pemilihan umum secara langsung dan juga yang tercantum dalam pancasila sila ke empat yang berbunyi”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwahi “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”¹.

Dalam UUD 1945 pasal 2 ayat (1) dikatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang² dan dalam pasal 19 ayat (1)

¹ UUD 1945, *Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini*, Pasal 22.

² *Ibid*, Pasal 2.

bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum³. Pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan untuk mewujudkan aspirasi rakyat dan kedaulatan rakyat dalam rangka memilih pemimpin baik lembaga Legislatif maupun Eksekutif, tetapi juga sebagai bagian dari proses peralihan kekuasaan yang dilakukan secara demokratis.

Tujuan dilaksanakan pemilihan umum yang pertama adalah bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mewujudkan suatu negara yaitu adanya pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahan secara sah dan diakui sedangkan dalam UU No 15 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) pemilihan umum yang selanjutnya di sebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945⁴.

Adapun yang menjadi syarat bisa dikatakan sebuah negara haruslah mempunyai yaitu yang pertama adanya wilayah, kedua adanya rakyat, ketiga adanya pemerintah yang berdaulat⁵, sedangkan menurut Soehino bahwa sebagai syarat yang keempat adalah adanya pengakuan internasional yang terbagi kepada dua hal yaitu secara *de facto* dan *de jure*⁶.

³ *Ibid*, Pasal 19.

⁴ UU No 15 Tahun 2011

⁵ Ellydar Chaidir dan Asri Muhammad Saleh, *Ilmu Negara*, (Pekanbaru: Mandiri Press, 2002), h. 26-27.

⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 7.

Pemilihan umum di Indonesia juga dikenal dengan nama pesta rakyat yaitu disebabkan pesta yang paling meriah dan besar diselenggarakan untuk kepentingan suatu negara, sebab tanpa ada pemimpin dalam mengatur sebuah negara ini diibaratkan sebagai sebuah kapal yang berlayar tetapi tidak ada nakhodanya.

Setelah dideklarasikan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta yang mengatakan kemerdekaan Indonesia dan terlepas dari penjajahan oleh negara luar, hingga saat ini telah terjadi beberapa kali pergantian pemimpin di Indonesia yang dilaksanakan baik melalui lembaga legislatif maupun pemilihan secara langsung yaitu dengan cara pemilu.

Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pertama kali pada tanggal 3 Juli 1971 dan berhasil menyusun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 1 Oktober 1972⁷.

Menjamin tercapainya penyelenggaraan pemilu yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan itu maka diperlukan pengawas pemilu dengan kewenangan yang jelas sehingga fungsi pengawasannya dapat berjalan efektif. Maka oleh sebab itu Panitia Pengawas Pemilu dibentuk oleh Bawaslu dengan keputusan pimpinan KPU sebagaimana pada pasal 1 ayat (18) UU No.15 Tahun 2011 yang berbunyi “panitia pengawas pemilu kabupaten/kota selanjut nya di singkat panwaslu adalah panitia yang di bentuk oleh bawaslu

⁷ Marrison, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005), h. 24.

provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota”.

Panwaslu bertugas mengawasi peserta pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan penyelenggaraan tahapan pemilihan legeslatif, Panwaslu ini sama dengan Panwaslu pada pemilihan presiden dalam sejarah pemilu yang berlangsung di negara Indonesia, kedudukan dan tugas serta wewenangnya dirumuskan secara jelas dan dicantumkan didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu. Berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu ada pembagian tugas pengawasan pemilu yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (a) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- (b) Panwaslu Provinsi mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- (c) Panwaslu kabupaten/kota mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- (d) Panwaslu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
- (e) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat desa/kelurahan;
- (f) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawsssi tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Adapun tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dapatlah dijelaskan secara umum sebagai berikut :

- (1) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu;
- (2) Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan pemilu;
- (3) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota atau kepolisian atau instansi lainnya untuk ditindaklanjuti;
- (4) Mengawasi tindak lanjut rekomendasi;
- (5) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- (6) Melaksanakan :
 - a) Tugas dan wewenang lain ditetapkan oleh undang-undang (untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota);
 - b) Melaksanakan tugas lain dari Panwaslu Kecamatan (untuk Pengawas Pemilu lapangan); dan
 - c) Melaksanakan tugas lain dari Bawaslu (untuk Pengawas Pemilu Luar Negeri).

Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang :

- (a) Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran;
- (b) Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu. maupun peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggara pemilu.

Setidaknya ada 4 faktor lain yang menentukan sukses tidaknya Pengawas pemilihan umum legislatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yaitu. Pertama pengawas haruslah badan Indenpenden non-partisan yang mempunyai integrasi dan dedikasi tinggi. Kedua, jajaran pengawas harus memahami dalam menangani masalah penyelenggaraan pemilihan. Ketiga, pengawas haruslah memperoleh fasilitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Keempat, pengawas harus mendapat dukungan dari instansi penegak hukum terkait dan dukungan masyarakat luas”⁸.

Keberadaan Panwaslu dalam pelaksanaan pemilihan DPR, DPD, dan DPRD sangat dituntut untuk bersikap objektif dalam melaksanakan tugasnya untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon. Agar terciptanya pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk menjadi calon anggota legislatif harus lah memenuhi persyaratan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemilihan umum, Anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, Dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁸ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004. hal. 7.

3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Terdaftar sebagai pemilih;
10. Bersedia bekerja penuh waktu;
11. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan

tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;

13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan⁹.

Selanjutnya dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan, bahwa tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota di antaranya adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota.
3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dan calon bupati/walikota.

⁹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum.

4. Penetapan calon bupati/walikota.
5. Pelaksanaan kampanye.
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
12. Proses penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota.

Tentunya dalam menjalankan tugas panitia pengawas pemilihan dalam mengawasi jalannya pemilihan calon DPR, DPD, dan DPRD tidaklah berjalan lancar sebagaimana diharapkan, banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan dilapangan seperti kekurangan persaratan dalam bentuk administrasi, money politik dan pemakaian mobil dinas disaat berlangsungnya kampanye, dan ada juga setelah pemilu tersebut terhadap kecurangan penghitungan suara, namun setiap ada pelanggaran ataupun sengketa yang terjadi antara pasangan calon sudah pasti menjadi tugas dari panwaslu dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Namun pada saat pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD pada saat sekarang ini banyak terjadi kecurangan dan banyak juga para calon yang tidak menerima hasil rekapitulasi suara yang di

hitung oleh KPUD yang ada di banyak daerah. Setelah laporan terhadap kecurangan yang terjadi maka panwaslu mengadakan penyidikan terhadap laporan tersebut dan apabila terbukti maka pihak panwaslu akan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses agar dapat diberikan sanksi hukum yang patut dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan yang berhubungan dengan pengawas pemilihan pada pemilihan kepala daerah di Kota Pekanbaru dengan judul penelitian adalah sebagai berikut : ***“Pelaksanaan Tugas Dan Wewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pemilihan umum (Study Di Kota Pekanbaru)”***.

Yang mana kita ketahui Fungsi dan wewenangan adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh panitia pengawas pemilihan umum dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan anggota dewan di Kota Pekanbaru tahun 2014.

Panitia pengawas pemilihan dalam pasal 1 ayat 18 UU No. 15 Tahun 2011 yaitu pengawas pemilihan yang dibentuk oleh Bawaslu yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan dari pemuk tahiran data sampai tahap pemilihan selesai.

Pemilihan anggota dewan yaitu pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih perwakilannya yang akan duduk di Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru yang berasal dari partai politik.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu, serta hambatan dan kendala yang di hadapi oleh Panwaslu dalam pemuktahiran data pemilih sementara dan pemilih tetap serta proses pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan atau administrasi menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah dalam penulisan dan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu dalam mengawasi pemilu pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu dalam pelaksanaan pengawasan pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru?

3. Apa solusi yang dilakukan oleh panwaslu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu dalam mengawasi pemilu pada bakal calon legislative berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi oleh panwaslu dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan legeslatif berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui bagai mana solusi yang dilakukan panwaslu terhadap pelanggaran yang terjadi.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis angkat adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang kedudukan dan peranan panitia pengawas pemilihan pada pemilihan legeslatif bagi penulis dan secara umum untuk dapat memberi gambaran kepada masyarakat mengenai panitia pengawas pemilu.

2. Untuk menambah informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap ruang lingkup yang sama.
3. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam upaya meningkatkan serta pengembangan jurusan Ilmu Hukum.

E. Karangka tiori

Dalam memberikan pengertian tentang Hukum Tata Negara para ahli berbeda pendapat tentang hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Kusmadi pudjosewajo “Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur Hukum Negara” (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan maupun bawahan beserta tingkatan-tingkatanya (*hirarchie*), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang) wewenang, tingkatan, imbasnya dari dan antar alat perlengkapan itu”¹⁰

Sedangkan beberapa sarjana memberikan definisi tentang hukum tata negara lebih ringkas seperti pendapat Van der pet yang menyatakan “Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungan satu dengan yang lainnya dan hubungan dengan individu.

¹⁰ Marrison, *Op. Cit*, l. 1.

Logemenn menyatakan Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara¹¹, sementara Scholten menyatakan Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Dengan demikian kalau kita mencari definisi tentang Hukum Tata Negara ini tentunya tidak akan mendapatkan pendapat yang sama dikarenakan bahwa yang membuat definisi ini hanyalah seorang manusia yang masih banyak kekurangannya, dari banyak definisi diatas Marisson memberikan kesimpulan terhadap berbagai definisi tersebut sebagai berikut:

1. Organisasi negara dan alat-alat perlengkapan negara.
2. Susunan negara.
3. Wewenang alat-alat perlengkapan negara.
4. Hubungan antara alat perlengkapan negara

Sumber hukum terbagi atas sumber hukum formil dan sumber hukum materil, Ufrecht menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum material adalah “keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum (*public opinion*) yang menentukan isi (materi) dari hukum”¹².

Negara Indonesia adalah negara hukum, semua landasan kegiatan yang berkaitan untuk negara itu diatur oleh peraturan-peraturan begitu juga dengan daerah juga diatur dengan peraturan di setiap kegiatan yang lebih dikenal dengan Peraturan Daerah.

Pemilihan calon dewan yang akan dilakukan pada setiap daerah yang ada di Indonesia untuk memilih orang-orang yang akan mewakili mereka

¹¹ *Ibid* , h. 2.

¹² *Ibid*.

dan yang akan memperjuangkan kepentingan mereka pada tingkat pemerintahan.

Menurut marrison ada 3 macam tujuan diadakannya pemilihan umum yaitu memungkinkan peralihan pemerintah secara aman dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dalam rangka melaksanakan hak azasi warga Negara¹³.

Tetapi agar dapat berjalan lancar maka perlu dibentuk suatu badan atau komisi yang menjalankan dan menjaga agar sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang No. 12 tahun 2003 pasal 15 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

1. Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional
2. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu

Tentunya dalam penyelenggaraan pemilu anggota perwakilan rakyat mempunyai azas yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 22E dan juga dalam Undang-undang No. 12 tahun 2003 serta Undang-undang No. 32 tahun 2005 yang terdapat dalam penjelasannya.undang-undang yaitu pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Adapun dari pengertian ini adalah sebagai berikut :

1. Langsung : Berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara orang lain dalam menentukan siapapun yang menjadi pilihannya pada pemilihan tersebut

¹³ *Ibid.*, h. 217.

2. Umum : Berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilihan umum, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
3. Bebas : berarti setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun, didalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya
4. Rahasia : berarti pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada saat surat suara datang dan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. Jujur : Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, panwaslu/panwaslih dan aparat yang lainnya haruslah bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil : berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan sesuai dengan azas pemilihan yang telah dijelaskan baik UUD 1945 maupun Undang-undang No. 32 tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan kepala daerah agar terciptanya pemilihan kepala daerah yang aman dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemilihan yang dinamakan dengan Panitia Pengawas Pemilihan.

Sedangkan yang mengangkat dan membentuk terhadap panitia pengawas pemilihan adalah Bawaslu dan disahkan oleh KPU. Panitia pengawas pemilihan ini terdiri dari beberapa unsur atau elemen yang saling bekerja sama adapun unsurnya yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers, serta tokoh masyarakat.

Tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan pada pemilihan kepala daerah sebagaimana tertera didalam Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.

2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota.
3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dan calon bupati/walikota.
4. Penetapan calon bupati/walikota.
5. Pelaksanaan kampanye.
6. Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusiannya.
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten.Kota dari seluruh kecamatan.
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
12. Proses penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota.

Dalam menyelenggarakan tugas yang berat ini tentu tidaklah sembarang orang yang bisa melakukan, sebab itu peraturan menetapkan karakter yang bisa dijadikan anggota pengawas pemilu yaitu :

1. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
2. Berhak dipilih dan memilih.

3. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.
4. Memiliki integritas yang kuat, jujur dan adil.
5. Memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan demokrasi
6. Memiliki pengetahuan dan visi yang jelas tentang parpol, pemilihan umum dan kemampuan kepemimpinan.
7. Tidak pernah dihukum penjara karena suatu tindak pidana¹⁴.

F. Metode Penelitian

Suatu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis atau empiris yang mana metode penelitian sangatlah menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada *Field Research*. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Menurut Soerjano Soekanto maksud dari Deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan dalam hal ini tentunya akan memberikan gambaran tentang fungsi dan kewenangan panitia pengawas pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan dewan perwakilan di Kota Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah panitia pengawas pemilu di Pekanbaru. Sedangkan objeknya adalah tugas dan wewenang pengawas pemilu.

¹⁴ Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, Jakarta, Eka Jaya, 2005. hal. 118.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Panwaslu, kemudian ditambah dengan Ketua KPU, dan 5 orang perwakilan dari masing partai politik yang ada di kota pekanbaru.

b. Sampel

Secara sederhana sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi. Sedangkan Sampel dalam penelitian ilmiah merupakan suatu hal yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya adalah merupakan generalisasi dari sampel yang dipilih¹⁵.

Dalam penelitian ini sampel yang dipilih dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, dari 12 perwakilan partai, maka yang diambil 20% yaitu sebanyak 5 orang, yakni ditunjuk langsung oleh peneliti sesuai dengan data yang hendak diperoleh.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis sumber data dalam penelitian di bagi kedalam 2 bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu: adapun data primer dalam penelitian adalah data yang penulis peroleh secara langsung dengan mengajukan wawancara dan angket terhadap sample dalam penelitian.
- b. Data skunder, yaitu: merupakan data yang sudah jadi atau merupakan data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder

¹⁵ Amiruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 97.

merupakan data yang penulis peroleh dengan mengumpulkannya melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5. Alat pengumpul data

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan sehingga bisa memberikan gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh maka penulis menggunakan alat pengumpul data yang penulis gunakan adalah, wawancara, yaitu: penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan Panwaslu di kota Pekanbaru. Untuk memperlancar proses wawancara tersebut penulis berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada data yang terlewatkan.

6. Analisa Data

Adapun analisa yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini terhadap data yang ada berupa dokumen yang didapat dari panitia pengawas pemilihan di kota Pekanbaru yang dikumpul serta hasil wawancara, kemudian untuk selanjutnya diolah dan disajikan serta dibahas berdasarkan permasalahan yang diteliti dalam hal bentuk uraian kalimat yang rinci, yang dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku dan pendapat para ahli hukum.

Terakhir penulis mengambil kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus yaitu data yang

penulis dapat dari panitia pengawas pemilihan kepada dalil-dalil umum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk Skripsi dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I: Berisi Pendahuluan yaitu yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian

BAB II: Tinjauan Umum Lokasi Penelitian yakni Gambaran Kota Pekanbaru dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif Kota Pekanbaru.

BAB III: Panwaslu Legislatif yaitu terdiri dari tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan pada pemilihan legislatif, serta hak dan kewajiban calon legislatif.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu pelaksanaan tugas dan wewenang panwaslu pada bakal calon legislative berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru, serta hambatan dan kendala panwaslu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru.

BAB V: Penutup, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101 derajat 18'-101 derajat 36' bujur timur dan 0 derajat 25'-0 derajat 45' lintang utara. Di riau daratan, posisi Kota Pekanbaru bisa dikatakan di tengah-tengah wilayah. Dengan letak yang demikian, membuatnya menjadi cukup strategis sebagai Ibu Kota Propinsi. Sedangkan batas-batasnya secara administratif adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis.

Secara geografis Kota Pekanbaru dibagi menjadi dua, yaitu wilayah utara sungai siak dan wilayah selatan sungai siak. Sebahagian besar lahan terbangun sampai saat ini berada di wilayah bagian selatan sungai siak.

Secara umum Kota Pekanbaru memiliki ketinggian 5-50 m dari permukaan laut. Sebagian wilayahnya terdiri dari daratan rendah yang rata-rata 0-2% dan sebagian kecil bergelombang 2-40%. Daratan rendah sebagian besar berada pada bagian selatan sungai siak dan sebagian yang bergelombang terletak pada bagian utara dan sebagian kecil di bagian selatan sungai siak dengan ketinggian 5-11 m dari permukaan laut.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Penduduk Kota Pekanbaru bersifat heterogen dengan latar belakang etnis, adat istiadat, agama, pendidikan, pekerjaan serta sosial budaya yang

berbeda. Dari segi etnis, Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk multi etnis. Kota ini dihuni oleh etnis Melayu, Minang, Batak, Jawa, Banjar, Bugis dan cina serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. Namun demikian etnis Melayu merupakan jumlah terbesar dan secara kebudayaan dominan. Hal ini karena kelompok etnis Melayu merupakan etnis asli daerah Riau, sedangkan kelompok etnis lainnya merupakan imigran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.¹

Heterogenitas penduduk cukup mewarnai kehidupan sosial penduduk Kota Pekanbaru. Interaksi antar kelompok etnis yang berbeda pada hakekatnya relatif punya jarak sosial tertentu. Namun demikian, struktur sosialnya di dukung oleh norma-norma agama dan adat. Meski kedua norma tersebut mempunyai kekuatan yang berbeda dalam mengikat anggota masyarakatnya, norma agama, terutama norma agama Islam yang banyak dianut oleh anggota masyarakat cukup dapat mempertautkan jarak sosial karena perbedaan etnis tersebut.

Stratifikasi masyarakat Kota Pekanbaru pada dasarnya bersifat terbuka, dimana semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki suatu posisi atau struktur sosial yang lebih tinggi. Biasanya Stratifikasi ditentukan oleh sesuatu yang dihargai. Keadaan seperti ini dapat dimengerti karena heterogenitas penduduknya baik dari aspek latar belakang pendidikan, etnis, pekerjaan, usaha dan jasa yang dilakukannya.

¹Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2012, h.63

Dalam masyarakat Kota Pekanbaru sekurang-kurangnya ada tiga bentuk pelapisan yang muncul kepermukaan yaitu berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan dan jabatan yang diduduki seseorang. Dari ketiga lapisan itu, terlihat aspek ekonomi mendapat tempat yang ketika melihat Kota Pekanbaru sebagai Kota Minyak dan perdagangan yang sedang menggeliat untuk memacu segala ketinggian dalam bidang dunia Industrialisasi.

Pekanbaru yang sedang bekerja keras untuk menjadi Kota Industri, perdagangan dan jasa. Tidak heran kalau ditemukan berbagai bangunan baru yang diperuntukan sebagai perkantoran, usaha retail lebih menonjol dibandingkan dengan dua aspek lainnya. Penilaian masyarakat yang demikian dapat dipahami dan hotel-hotel yang indah bak pencakar langit. Di samping itu berdiri pula, mall, fast food, Cafe sebagai tempat masyarakat berbelanja yang sudah bertebaran di beberapa kawasan di Kota Pekanbaru. Namun demikian hal-hal di atas akan melahirkan berbagai masalah sosial yang akan menimbulkan kerawanan di dalam masyarakat yang baru saja mengalami krisis moneter. Semua itu membawa pengaruh di dalam kehidupan sosial.²

Pada era reformasi membawa angin segar bagi masyarakat Riau pada umumnya dan Kota Pekanbaru khususnya. Era dimana masyarakat Riau mulai bisa bersuara atau menyuarakan keinginan dan aspirasinya. Melalui kelompok-kelompok reformasi serta kalangan intelektual Riau, masyarakat Riau mulai menuntut pembagian hasil kekayaan alamnya atau pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah, 10 % hasil minyak Riau untuk dapat

²*Ibid.*

dimanfaatkan guna pembangunan Riau. Sejak otonomi daerah dilancarkan dan adanya perimbangan keuangan tersebut, denyut pembangunan mulai dapat dirasakan, termasuk pembagunan Kota Pekanbaru sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Riau.

Masyarakat Riau pada umumnya dan Pekanbaru khususnya bisa berbangga diri ketika pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang di jabarkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah mendatangkan berkah yang luar biasa bagi bumi lancang kuning, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Kota yang ada di provinsi Riau.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Pekanbaru, dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang terdiri dari Walikota, DPRD Kota Pekanbaru, Sekretaris Kota dan Dinas-Dinas Kota Pekanbaru, yang menangani berbagai bidang dan sektor. Selain itu instansi-instansi Kota Pekanbaru ini juga mempunyai hubungan teknis substantive dengan instansi-instansi vertikal. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut tentunya peran serta masyarakat menjadi hal yang penting dan utama dalam mendukung percepatan pembangunan Kota Pekanbaru yang sesuai dengan harapan semua pihak, tanpa dukungan masyarakat tentunya pembangunan di segala bidang yang direncanakan tidak akan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah digariskan.

B. Sejarah Panwaslu

Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak lengkap kalau tidak membahas Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas. Menurut undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan.

Pengawas Pemilu adalah lembaga ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia.

Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Proses pelaksanaan Pemilu 1971 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982,

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1971 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982..

Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat UU No. 12/2003. yang menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

C. Panitia Pengawas Pemilu Legislatif Kota Pekanbaru

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Legislatif Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif merupakan unsur yang harus dibentuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2014.

Panwaslu Kota Pekanbaru bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kota Pekanbaru, mulai dari pemutakhiran data pemilih sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara. Panwaslu Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a) Ketua.
- b) Divisi Sumber daya manusia dan Organisasi.
- c) Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.
- d) Divisi Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran.

Kemudian secara administrasi Panwaslu Kota Pekanbaru dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat, dan dibantu oleh seorang bendahara.

Panwaslu Kota Pekanbaru membawahi Pengawas Kecamatan (Panwascam) , yang terdiri dari:

- a) Panwascam Rumbai
- b) Panwascam Rumbai Pesisir
- c) Panwascam Senapelan
- d) Panwascam Sukajadi
- e) Panwascam Payung Sekaki
- f) Panwascam Lima Puluh
- g) Panwascam Sail
- h) Panwascam Bukit Raya
- i) Panwascam Tenayan Raya
- j) Panwascam Tampan
- k) Panwascam Pekanbaru Kota

1) Panwascam Marpoyan Damai.

Seluruh Panwascam yang ada dalam Kota Pekanbaru berkoordinasi secara langsung kepada Panwaslu Kota Pekanbaru. Dalam berbagai hal terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kecamatan, maka panwascam langsung memberikan laporan kepada Panwaslu Kota Pekanbaru untuk ditindaklanjuti, baik secara administratif maupun secara hukum.

Panwaslu Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Setiap tahapan pemilu senantiasa dipantau dan diawasi oleh panwas, sampai nantinya pada saat penghitungan suara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas sampai kepada tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal ini dilakukan agar setiap tahapan pemilihan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu panwaslu juga sebagai komponen dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang mempunyai tugas penting, yakni dalam hal memantau dan mengawasi berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Apabila ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan, maka tugas panwaslu adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti dan segera memproses sampai kepada KPU, atau apabila terjadi pelanggaran pidana pemilu akan dilanjutkan kepada pihak kepolisian.

BAB III

PANITIA PENGAWAS PEMILU LEGISLATIF

A. Tugas dan Wewenang Panwaslu

Syarat-syarat untuk menjadi keanggotaan panwaslu; sehat jasmani dan rohani, berhak memilih dan dipilih, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, memiliki komitmen yang kuat untuk penegakan demokrasi, memiliki integritas yang kuat, jujur, dan adil, memiliki pengetahuan dan visi yang jelas tentang partai politik, pemilihan umum dan kemampuan kepemimpinan.

Dalam lembaga panwaslu memiliki 3 anggota dan 1 ketua yang didalamnya memiliki peran masing-masing;

- 1) Divisi sumber daya manusia dan organisasi.
- 2) Divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga.
- 3) Divisi pencegahan dan penindakan pelanggaran.

Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota.

3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dan calon bupati/walikota.
4. Penetapan calon bupati/walikota.
5. Pelaksanaan kampanye.
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten.Kota dari seluruh kecamatan.
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
12. Proses penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota.

Selanjutnya menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undang mengenai pemilu. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Kemudian menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk ditindaklanjuti, serta meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.

Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota.

Selanjutnya mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung.

Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Panwaslu kabupaten/kota dapat:

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas.
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu.

Dari beberapa ketentuan tersebut dapat dilihat dan diketahui bahwa Panwaslu Kota Pekanbaru secara administratif dapat menilai dan

mengawasi tahapan-tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Apabila terdapat kejanggalan atau tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, maka panwaslu dapat memberikan teguran atau sanksi secara administratif kepada penyelenggara atau kepada calon anggota legislatif.

Di samping itu tugas dari panwaslu juga menciptakan pemilu yang jujur dan adil, jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak-pihak tertentu atau merugikan pelaksanaan pemilu secara umum. Dengan demikian keberadaan panwaslu sebagai pihak yang mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan wewenang panwaslu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang kiranya harus mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat, karena pengawasan yang dilakukan tidak mungkin dapat mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan cepat dan dapat menjangkau sampai ke daerah-daerah yang terpencil.

Oleh karena itu tugas panwaslu adalah memang tidak mudah dan memerlukan perhatian dan keseriusan bagi anggota panwas dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap semua tahapan pemilu.

Panwaslu di setiap tingkatan memiliki peran sentral dalam penanganan pelanggaran administrasi dengan melakukan pengawasan dan menerima laporan dari masyarakat. apabila menemukan terjadinya pelanggaran administrasi panwaslu melaporkan kepada KPU.¹

¹Janedjri M.Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h.57

Di samping mekanisme dan tahapan penanganan pelanggaran pemilu, undang-undang pemilu juga menentukan batas waktu penanganan oleh setiap lembaga. Pemenuhan batas waktu tersebut sangat penting, karena putusan terhadap pelanggaran tersebut mempengaruhi tahapan selanjutnya dan keberhasilan pelaksanaan pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, kesiapan dan kerja sama dari lembaga-lembaga terkait, yaitu KPU, Panwaslu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sangat dibutuhkan. Demikian pula halnya dengan kerja sama dari peserta pemilu dan seluruh masyarakat.²

Sehubungan dengan hal tersebut, maka semua komponen harus mendukung tugas-tugas yang dilakukan oleh panwaslu dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemilihan umum sampai pada tingkat kecamatan dan kelurahan.

B. Hak dan Kewajiban Calon DPR, DPD, dan DPRD

Proses pengajuan calon legislatif mulai dari DPR, DPD, dan DPRD diajukan oleh masing-masing Partai Politik peserta pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Bakal calon anggota dewan yang diajukan oleh masing-masing Partai Politik selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi terhadap data-data bakal calon yang diajukan tersebut. Kemudian tahap selanjutnya adalah penetapan calon tetap anggota dewan yang telah lolos verifikasi yang dilakukan oleh KPU.

²*Ibid*, h.58

Setelah dilakukan penetapan terhadap calon legislatif tersebut sebagai calon tetap, maka secara hukum calon anggota legislatif tersebut berhak untuk mengikuti pemilihan umum. Kemudian juga berhak untuk menjadi juru kampanye pada masa kampanye yang ditentukan oleh KPU.

Di samping hak yang dimiliki oleh calon anggota legislatif, juga memiliki kewajiban, yaitu seluruh calon anggota legislatif mulai dari tingkat Kabupaten/ Kota, Propinsi dan DPR RI wajib mengikuti dan mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Di antara kewajiban yang harus ditaati adalah, bahwa semua calon anggota legislatif harus mengikuti tahap-tahap pemilihan umum yang telah ditentukan oleh KPU. Di antaranya adalah harus mengikuti ketentuan masa kampanye, apabila belum waktunya maka semua calon anggota legislatif tidak dibolehkan melakukan kampanye.

Kepada semua calon anggota legislatif juga tidak dibenarkan melakukan kampanye di tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh KPU.

Bagi calon anggota legislatif mempunyai hak untuk mengikuti semua tahapan pemilihan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Bagi setiap warga negara berhak untuk dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Di samping itu bagi calon anggota legislatif juga mempunyai hak untuk diperlakukan sama oleh penyelenggara pemilihan umum dalam hal mengikuti tahapan pemilihan umum yang telah ditentukan. Oleh karena itu setiap calon anggota legislatif harus bisa menggunakan haknya dalam pemilihan umum, karena hak dipilih adalah merupakan hak bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan.

Tentunya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif adalah diatur melalui partai politik yang akan mengusulkannya sebagai calon anggota legislatif sesuai dengan tingkatannya. Dengan demikian semua tahapan pemilihan umum sudah ditentukan oleh undang-undang dan disampaikan kepada partai politik peserta pemilu.

Kemudian bagi calon anggota legislatif juga mempunyai kewajiban, yakni mengikuti semua tahapan pemilihan mulai dari kelengkapan persyaratan sampai kepada tahapan kampanye dan penghitungan suara. Persyaratan administrasi sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap calon, tanpa ada data yang dimanipulasi atau dipalsukan, karena apabila ketahuan dapat didiskualifikasi atau tidak dapat ikut serta sebagai calon anggota legislatif.

Kemudian kewajiban dari calon anggota legislatif adalah tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap tahapan-tahapan pemilu sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Oleh karena itu yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pemilu adalah proses dari pemilu itu sendiri, yaitu mekanisme yang harus

dijalankan dalam pemilu, seperti penentuan calon, kepanitiaan, saksi-saksi, cara kampanye dan sebagainya.³ Sehingga dalam pelaksanaan pemilu tersebut dapat mendekati kejujuran dan keadilan.

Sedangkan yang terpenting dalam suatu negara hukum ialah bagaimana upaya untuk mempertahankan konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat. Untuk itu semua pihak harus saling bekerja sama untuk memantau jalannya tahapan pemilihan umum.

Panitia pengawas yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum juga harus menggunakan wewenangnya dalam memantau semua pelanggaran yang terjadi di lapangan. Pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pelanggaran administrasi dan dapat pula pelanggaran pidana pemilu, yakni dalam bentuk pemalsuan, penipuan dan sebagainya.

Apabila tugas dan wewenang dari panwaslu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka diharapkan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tersebut dapat terlaksanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

³ Moh. Mahfud. MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.228

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kota Pekanbaru

Pemilihan Umum merupakan pertarungan nasional yang menentukan masa depan demokrasi. Apabila Pemilu berjalan dengan lancar, efisien, efektif, serta tidak mengganggu perekonomian nasional, maka masa depan demokrasi akan semakin cerah. Begitu juga sebaliknya, apabila pemilu menimbulkan kekacauan, maka kekuatan anti-demokrasi mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa demokrasi hanya menimbulkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Sehubungan telah berjalannya pemilihan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD kota pekanbaru yang akan dilaksanakan tahun 2014 mendatang pihak KPU telah menjalankan fungsinya dan memberikan perintah kepada pihak panwaslu yang berupa rekomendasi antara lain:

- 1) Pihak KPU telah memberi rekomendasi kepada pihak panwaslu untuk menjalankan pemantauan yang berhubungan dengan administrasi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- 2) KPU telah memberikan teguran kepada panwaslu terhadap pendirian baliho-baliho yang telah dipasang oleh parpol karna waktu pemasangan adribut belum masuk pada waktunya.
- 3) KPU telah memberikan BIMTEK (bimbingan teknis) terhadap KPPS di kota pekanbaru.

Yang mana pihak KPU telah mendapat laporan dari masyarakat yang mengenai tentang pencalonan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mana berhubungan dengan administrasi yaitu banyak pemalsuan terhadap data kependudukan atau kartu identitas ganda para calon yang mana laporan yang didapat oleh KPU kebanyakan dari masyarakat para calon itu akan dipilih, serta pihak KPU juga mendapat teguran dari pihak pemerintah kota yang berhubungan dengan pendirian atribut atau baliho para parpol yang didirikan belum masuk jadwal kampanye atau sosialisasi, dan juga pihak KPU telah mengadakan pelatihan bimbingan teknologi terhadap KPPS yang mana pada saat pemilihan gubernur KPPS banyak menimbulkan kejanggalan-kejanggalan yang mana secara umum Panwaslu mendapatkan beberapa kolom yang kosong yaitu kolom DPT laki-laki dan DPT perempuan yang mana pihak KPU tidak ingin terjadi kesalahan yang sama maka pihak KPU mengadakan pelatihan terhadap KPPS untuk pemilihan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD kota pekanbaru.¹

Sehubungan dengan telah berjalannya pendaftaran para calon anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana partai politik telah menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan pendaftaran para calon dari masing-masing partai dengan mengikuti instruksi dari KPU atau Panwaslu kota pekanbaru agar nantinya tidak mendapatkan masalah dan akan lulus verifikasi dari pihak KPU.²

¹ Tengku Rafiajl (ketua KPU kota pekanbaru)

² Juprian, SE (Dari partai Gerindra)

Dengan keluarnya surat perintah dari KPU panwaslu telah menjalankan tugas dan wewenangnya yang berhubungan dengan:

- 1) Terhadap pemuktahiran data dari tingkat daftar pemilih sementara sampai daftar pemilih tetap dan tata cara pencalonan dan pemuktahiran data yang berhubungan pemuktahiran data yang bergubungan dengan atministrasi para calon anggota DPR,DPD, dan DPRD.
- 2) Telah memberi himbauan kepada para parpol dalam berbentuk surat peringatan terhadap pemasangan baliho-baliho yang telah dilakukan oleh parpol.

Sehubungan keluarnya surat perintah dari KPU yang mana pihak KPU meminta kepada pihak panwaslu agar dapat memantau pelaksanaan pendaftaran para calon angota legislatif yang mana dilapangan banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan terhadap DCS (daftar calon sementara) antara lain para calon menggunakan identitas ganda atau kependudukan yang tidak menetap. tentang pendirian baliho-baliho pihak panwaslu telah menyurati kepada pihak parpol agar baliho-baliho yang telah dipasang yang tidak sesuai ketentuan agar dapat ditertibkan kembali dan bila parpol tidak mengindahkan teguran tersebut maka pihak panwaslu akan menindak lanjuti pelanggaran itu sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pihak KPU.³

Dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum telah ditetapkan dalam undang-undang, bahwa dibentuk Panitia Pengawas (Panwas) untuk tingkat

³ Budi candra(ketua panwaslu kota pekanbaru)

Kabupaten/Kota, dengan tugas untuk mengawasi tahapan pemilihan umum agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan, bahwa di antara tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi:

- a) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
- b) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota.
- c) Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dan calon bupati/walikota.
- d) Penetapan calon bupati/walikota.
- e) Pelaksanaan kampanye.
- f) Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusiannya.
- g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
- h) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
- i) Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
- j) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten.Kota dari seluruh kecamatan.

- k) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
- l) Proses penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota.

Selanjutnya menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undang mengenai pemilu. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Kemudian menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk ditindaklanjuti, serta meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.

Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota.

Selanjutnya mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung.

Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Panwaslu kabupaten/kota dapat:

- a) Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas.
- b) Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu.

Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu, di wilayah kerjanya masing-masing, baik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat ad hoc, dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

Dalam tulisan ini yang dibahas adalah mengenai pengawasan terhadap tahapan pemilu anggota legislatif di Kota Pekanbaru, untuk pemilu legislatif Tahun 2014 yang mana saat ini telah dimulai tahapan-tahapannya, di antaranya adalah pendaftaran dari daftar pemilih sementara sampai daftar pemilih tetap dan penetapan calon legislatif untuk Tahun 2014 tersebut.

Adapun Persyaratan dan Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Pekanbaru:

1. Warga Negara Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (taat menjalani kewajiban agamanya).
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia.
5. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA).
6. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar negara, UUD Negara RI Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Terdaftar sebagai pemilih.
10. Bersedia bekerja sepenuh waktu.
11. Mengundurkan diri sebagai PNS, anggota Tentara Nasional, anggota Kepolisian Negara RI, pengurus BUMN/BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.
12. Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai Akuntan Publik, Advokat/ Pengacara, Notaris, PPAT, dan tidak melakukan pekerjaan penyedia

barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Menjadi anggota Partai Politik peserta pemilu.

14. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Lembaga Perwakilan.

15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Daerah Pemilihan.⁴

Selanjutnya untuk membuktikan persyaratan tersebut di atas, seorang bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD memerlukan kelengkapan administrasi yang berupa surat keterangan dari lembaga yang berwenang sesuai dengan persyaratan tersebut.

Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Bustami Ramzi selaku anggota Panwaslu Kota Pekanbaru mengatakan, bahwa panwas senantiasa melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Pekanbaru, terutama mengenai keabsahan persyaratan bagi bakal calon anggota Dewan Kota Pekanbaru.⁵

Untuk calon anggota Dewan Kota Pekanbaru yang akan bertarung pada Tahun 2014 mendatang belum ada ditemukan data-data yang palsu atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, namun demikian panwas senantiasa menerima menunggu dan menerima laporan dari masyarakat atau lembaga-lembaga

⁴Nur Syamsi Nurlan, *Kiat-Kiat Menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD*, (Jakarta: Katulistiwa, 2008), h.63. Lihat pula Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.185

⁵Bustami Ramzi (anggota Panwaslu Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2013

yang menemukan fakta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal itu panwas juga berharap partisipasi dari berbagai pihak untuk bekerja bersama-sama dalam mengawal kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan umum pada Tahun 2014 mendatang. Untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas memang memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak.⁶

Pemilu diperlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang akan menjadi kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat.

Untuk mencapai tujuan itu, pemilu harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas itu mengikat keseluruhan proses pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah. UUD 1945 menentukan, bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁷

Berkenaan dengan mewujudkan pemilu yang jujur dan adil memang tidak semudah apa yang dibayangkan, berbagai persoalan dapat saja terjadi dalam masyarakat, seperti adanya pihak-pihak yang tidak mengikuti aturan

⁶Indra Dinata (anggota Panwaslu Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2013

⁷Janedjri M.Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h.45

main sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Untuk mendapatkan pemilu yang berjalan dengan lancar dan aman, maka penyelenggara pemilu harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Demikian juga halnya dengan Panwaslu Kota Pekanbaru, harus benar-benar dapat menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses penetapan calon tetap anggota Dewan Kota Pekanbaru, didahului dengan proses melengkapi persyaratan administrasi bakal calon anggota dewan Kota Pekanbaru melalui partai politik masing-masing calon. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran bakal calon anggota ke KPU Kota Pekanbaru. Sebagaimana dijelaskan oleh Eka Riati salah seorang calon legislatif/ calon anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Hanura yang mengatakan, bahwa dirinya dicalonkan dari Partai Hanura untuk calon anggota DPRD Kota Pekanbaru telah mengurus semua kelengkapan administrasi mulai dari pendaftaran sampai terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Pekanbaru, memang tidak mudah untuk menjadi anggota DPRD karena berbagai syarat harus dipenuhi dan semuanya harus jelas dan tidak boleh ada yang palsu atau manipulasi persyaratan, karena nantinya dapat didiskualifikasi dari calon anggota DPRD Kota Pekanbaru.⁸

Apabila ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dalam persyaratan administrasi bakal calon atau calon anggota, KPU Kota Pekanbaru

⁸Eka Riati (Caleg DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Hanura), *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2013

berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Demikian juga dengan ungkapan yang disampaikan oleh Bustami Ramzi anggota Panwaslu Kota Pekanbaru yang mengatakan, bahwa panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kota Pekanbaru senantiasa melakukan pengawasan terhadap kelengkapan administrasi dari semua calon anggota dewan Kota Pekanbaru untuk sampai kepada penetapan pada daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat Kota Pekanbaru.¹⁰

Pengawasan tersebut dilakukan agar para calon anggota Dewan Kota Pekanbaru tersebut memang benar-benar calon yang mempunyai kualitas dan mentalitas yang diharapkan dapat memajukan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan untuk masa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Asas jujur dan adil tidak hanya terwujud dalam mekanisme procedural pelaksanaan pemilu, tetapi juga harus terwujud dalam segala tindakan penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. dengan demikian, asas jujur dan adil menjadi spirit keseluruhan pelaksanaan pemilu.

Asas jujur dan adil diimplementasikan pada dua tataran, yaitu tataran aturan normative dan tataran moralitas pelaksanaan pemilu. Tataran aturan normative sendiri terdiri dari dua jenis, yakni aturan yang bersifat preventif

⁹Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.193

¹⁰Bustami Ramzi (anggota Panwaslu Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2013

dan aturan yang bersifat represif. Aturan preventif berisi ketentuan tentang tindakan- tindakan yang harus dan yang tidak boleh dilakukan dalam keseluruhan tahapan pemilu. Aturan preventif juga mengatur mekanisme penyelesaian apabila ada sengketa yang melanggar asas jujur dan adil

Sedangkan aturan represif adalah ketentuan yang memberikan ancaman hukuman kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, karena bertentangan dengan asas jujur dan adil. Dalam ketentuan undang-undang disebutkan bahwa sanksi yang dapat diberikan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana pemilu baik kepada pemilih, peserta, penyelenggara, bahkan pejabat pemerintah.¹¹

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa panwaslu senantiasa melakukan pemantauan di lapangan termasuk daerah-daerah yang terpencil yang rawan dengan penyimpangan. Oleh karena itu semua hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu senantiasa dipantau oleh Panitia Pengawas.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014 masih ada beberapa bulan, maka semua pihak yang bersangkutan harus mampu menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam hal mengawal jalannya proses demokrasi yang dirasakan masih rendah

Walaupun pelaksanaan kampanye pemilu legislatif belum dilaksanakan, tetapi masing-masing calon telah melakukan pemasangan baliho, spanduk, ungkapan dan sebagainya yang mempromosikan dirinya

¹¹Janedjri M,Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Konstitusi Press, 2012), h.47

untuk bertarung pada Tahun 2014 mendatang, sebenarnya hal ini sudah merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Indra Dinata yang mengatakan, bahwa sebenarnya pemasangan baliho, spanduk dan sebagainya yang berhubungan dengan calon memang tidak dibenarkan menurut undang-undang karena belum memasuki tahap kampanye, tetapi hal ini memang sudah menjadi kebiasaan bagi para calon melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, walaupun sebenarnya bertentangan dengan aturan yang berlaku.¹²

B. Hambatan Panwaslu dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang

Semua kegiatan atau program sudah pasti ada menemukan kendala atau hambatan, demikian juga halnya dengan pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh KPU pekanbaru ataupun Panwaslu Kota Pekanbaru, dalam rangka untuk mengawal kelancaran tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan umum legislatif yang sampai saat ini telah sampai kepada penetapan daftar calon tetap anggota legislatif Tahun 2014.

Dalam hal menjalankan tugasnya KPU mendapatkan hambatan dalam penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD;

- 1) Sulitnya mengamankan para calon yang telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sedangkan surat edaran yang berhubungan dengan sosialisasi itu belum dikeluarkan.

¹²Indra Dinata (anggota Panwaslu Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2013

- 2) Sulitnya memuktahirkan data pemilih dikarenakan jumlah daftar pemilih tetap meningkat dibandingkan pada pemilihan Gubernur Riau.¹³

Sehubungan dengan kampanye belum masuk pada waktunya yang mana para pihak parpol telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang daftar DCT (daftar calon tetap) belum di umumkan oleh pihak KPU disini jelas sudah melanggar aturan tutur Tengku Rafijal yang mana juga surat edaran tentang sosialisasi itu sendiri belum dikeluarkan oleh pihak KPU disini sudah jelas menyalahgunakan wewenang sebagai calon anggota legislatif, dan juga pihak KPU sulit untuk memuktahirkan data pemilih tetap yang mana ungkapan Tengku Rafijal mangatakan bahwa ada beberapa faktor terutama pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu signifikan setiap tahunnya, banyak juga mereka yang masih pelajar pada saat ini atau berumur 16 tahun, pada 2014 mendatang telah beranjak 17 tahun dan berhak untuk memilih legislatornya.¹⁴

Adapun hambatan yang dialami oleh Parpol atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD;

- 1) Pihak KPU selalu mempersulit parpol untuk mencalonkan calon legislatifnya

¹³ Tengku rafijal (ketua KPU kota pekanbaru), wawancara tanggal 22 oktober 2013

¹⁴ Ibid

Yang mana pihak KPU mempersulit proses pendaftaran para calon dikarenakan ada beberapa aduan dari masyarakat mengenai status kependudukan DCS yang memiliki Kartu identitas yang ganda.¹⁵

Adapun hambatan yang dialami Panwaslu Kota Pekanbaru sebagaimana ungkapan yang diberikan oleh Budi Candra selaku Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru adalah;

1. Sulitnya untuk memantau pemasangan baliho, gambar atau stikur calon-calon anggota DPRD Kota Pekanbaru, yang saat ini telah banyak terpajang di sepanjang jalan di Kota Pekanbaru.
2. mengenai kekurangan anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas panwaslu sehingga panwaslu kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya.
3. Kurangnya sumber daya manusia atau anggota untuk pemantauan¹⁶.

Adapun kendala yang dialami oleh KPU dan Panwaslu Kota Pekanbaru sebagaimana ungkapan yang diberikan oleh Tengku Rafijal dan Budi Candra selaku Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru adalah;

Adapun kendala yang di hadapi KPU:

- 1) Terkendala dalam masalah anggaran yang mana pemerintah kota sering terlambat dalam hal pencairan anggaran yang di peruntukkan kepada KPU atau panwaslu.
- 2) Kurangnya laporan-laporan yang masuk ke KPU disebabkan semua tingkatan yang terkait kurang berkerja sama dalam pemantauan.

¹⁵ Marlan sihombing (dari partai PKPI)

¹⁶Budi Candra (Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2013

Sedangkan pihak Panwaslu terkendala dalam:

- 1) masih terkendala dalam pembentukan PPL (Panitia Pengawas Lapangan) karena anggaran untuk panwaslu masih belum optimal sehingga panwaslu masih belum bisa membentuk PPL atau panitia pengawas lapangan.
- 2) sejauh ini masih terkendala dalam SDM (Sumber Daya Manusia) itu sendiri sehingga pelaksanaan tugas panwaslu masih kurang maksimal.

Apabila dalam penyelenggaraan pemilu tidak berlakunya asas pemilu, maka akibatnya adalah terjadinya pengingkaran ruh demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu, baik oleh penyelenggara maupun peserta. Apabila dalam prakteknya, penyelenggara pemilu menjadi pemain untuk memenangkan peserta pemilu tertentu dengan cara-cara yang melanggar aturan dan prinsip demokrasi, maka hasil pemilu tidak akan mencerminkan pilihan rakyat.

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pemilu merupakan implementasi dari konsep kedaulatan rakyat yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Artinya bahwa kekuasaan yang tertinggi itu sebenarnya berada di tangan rakyat, segala sesuatunya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dari sinilah gambarannya bahwa arti penting dari pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tercermin dalam bentuk pemilu yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta ditambah dengan jujur dan adil. Hal ini dilakukan sebagai implementasi dari suatu negara yang memegang teguh konsep demokrasi.

Apabila kita akan melaksanakan kebijakan politik secara baik, maka kebijakan yang dilakukan harus selalu mengarah kepada pemikiran tentang bagaimana demokrasi yang betul, jujur, adil dan sebagainya. Namun yang terjadi di Indonesia sebenarnya ada dua fenomena. Pertama, irasional. Karena banyak wacana politik, ketika mencapai tujuan tertentu, menghalalkan semua cara. Kedua, politik di Indonesia sudah terkait dengan penggunaan kekuasaan, antara lain ketika terjadi mobilisasi untuk mencapai tujuan, maka yang digunakan adalah kekuasaan. Maksudnya adalah ketika kekuasaan ada di tangan, kita lupa ciri khas masyarakat Indonesia yang majemuk. Majemuk di sini berarti bahwa kita butuh toleransi, tidak mungkin politik di Indonesia dibuat seragam, tidak bisa dibuat semacam penyatuan, dan tidak bisa dibuat menangnya sendiri.¹⁷

Sehubungan dengan itu untuk menjadikan pemilu yang berkualitas dan tidak ada cacat memang tidak mudah, sebagaimana yang terjadi di Kota Pekanbaru, bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru senantiasa berusaha untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun masih juga ada kendala yang dihadapi.

¹⁷ Mudji Sutrisno, *Demokrasi Semudah Ucapankah?*, (Yogyakarta: Kanisius, Yogyakarta, 2000), h.15

Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Bustami Ramzi selaku anggota Panwaslu Kota Pekanbaru yang mengatakan, bahwa kendala yang dihadapi oleh Panwaslu Kota Pekanbaru adalah hambatan yang sifatnya klasik, yakni mengenai kekurangan anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas panwaslu.¹⁸

Panwaslu Kota Pekanbaru memang agak kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan karena kekurangan dana, karena anggaran memang sering terlambat, sehingga panwas kecamatan juga terlambat menerima honor karena belum dikeluarkan oleh pemerintah kota. Sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan oleh panwas memang masih belum maksimal karena anggaran yang diperuntukkan untuk panwas terlambat dikeluarkan oleh bagian keuangan pemerintah kota.

Tugas-tugas dari panwaslu Kota Pekanbaru memang sangat penting karena berhubungan dengan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu di lapangan. Apabila kerja dari panwaslu tidak maksimal, maka akan timpang karena tidak dapat mengawasi penyelenggaraan pemilu dengan sempurna. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Tengku Rafizal selaku Ketua KPU Kota Pekanbaru yang mengatakan, bahwa tugas dari panwas adalah sangat penting dalam mengawasi tahapan pemilihan umum, agar dapat mengawasi penyelenggaraan pemilu di lapangan.¹⁹

Sehubungan dengan itu tugas panwas memang sangat penting karena berhubungan dengan mengawasi seandainya terjadi pelanggaran terhadap

¹⁸Bustami Ramzi (anggota Panwaslu Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2013

¹⁹Tengku Rafizal (Ketua KPU Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2013

penyelenggaraan pemilu, baik dari penyelenggara, dari peserta, atau dari masyarakat yang senantiasa harus diawasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemilu yang dilakukan secara demokratis harus melalui serangkaian tahapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian maka setiap komponen yang ada dalam penyelenggaraan pemilu harus dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagaimana halnya tugas panwaslu, yaitu mengawasi jalannya tahapan pemilihan umum dengan jujur dan adil.

Pelanggaran administratif merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur oleh KPU. Pada setiap tingkatan, panwaslu memiliki peran sentral dalam penanganan pelanggaran administrasi dengan melakukan pengawasan dan menerima laporan dari masyarakat. apabila menemukan terjadinya pelanggaran administrasi panwaslu melaporkan kepada KPU.²⁰

Pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu. Laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut disampaikan panwaslu kepada penyidik kepolisian yang selanjutnya melakukan proses penyidikan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Demikian pentingnya tugas panwaslu dalam penyelenggaraan pemilihan umum, agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan kehendak

²⁰Janedjri M.Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h.50

rakyat. Berbagai hal harus diperhatikan agar pemilihan umum memang benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang.

Dari beberapa gambaran tentang persoalan yang telah terjadi, maka yang perlu diperbaiki adalah proses atau pelaksanaannya di lapangan, sistem pemilu apapun yang dipakai sebenarnya telah sesuai dengan prinsip negara hukum. Berbagai sistem pemilu yang ada sebenarnya merupakan upaya implementasi yang tepat atas prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Baik sistem mayoritas dan sistem distrik maupun sistem proporsional adalah sesuai dengan prinsip negara hukum. Artinya sistem yang mana pun yang akan diterapkan oleh suatu negara hukum tetaplah baik sejauh pilihan atas sistem tersebut telah dilakukan menurut prosedur dan oleh lembaga yang benar.²¹

Ungkapan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa yang harus diperbaiki untuk pemilu yang akan datang adalah mekanisme yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pemilu, sedangkan sistemnya menurut penulis dapat saja mempertahankan sistem yang telah dituangkan dalam undang-undang, yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.

Di samping itu dalam pelaksanaan pemilu, ada beberapa hal atau persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin adanya sistem perwakilan rakyat yang signifikan dengan sistem dan format otonomi daerah;

²¹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.227

2. Menjamin keterlibatan publik masyarakat pemilih dalam seleksi calon legislatif yang dilakukan partai politik. Misalnya, melalui penyampaian visi dan sikap calon legislatif di hadapan publik calon pemilih yang diselenggarakan oleh partai politik;
3. Menjamin berfungsinya hubungan keterwakilan antara wakil dengan terwakil (konstituen) di daerah kabupaten/kota;
4. Sistem pemilu harus signifikan dengan struktur sosial, struktur demografi, struktur geo-ekonomi dan struktur etnografi masyarakat Indonesia;
5. Adanya akuntabilitas publik dari wakil kepada konstituen, baik secara moral, etika dan politik;
6. Adanya jaminan kedaulatan anggota DPR selaku wakil rakyat;
7. Adanya jaminan bahwa rakyat pemilih mampu dan berdaya untuk melakukan kontrol secara efektif terhadap wakil rakyat;
8. Adanya mekanisme dan sistem yang mampu mengecilkan kemungkinan distorsi politik dalam hubungan keterwakilan rakyat dan efektivitas sirkulasi aspirasi politik;
9. Adanya jaminan anti diskriminasi daerah dimana partai politik yang memperoleh suara banyak dari daerah padat penduduk, seharusnya memperoleh jumlah kursi secara lebih proporsional;
10. Mencegah tirani mayoritas terhadap minoritas.²²

²² Ganjar Razuni, *Sebuah Koreksi Konstruksi Reformasi Hasil Pemilu 1999*, (Jakarta: Unas Press, 2001), h.85

Oleh karena itu, antara sistem kepartaian, sistem pemilu, model kelembagaan parlemen dengan sistem pemerintahan dan sistem otonomi daerah yang dianut, haruslah sejajar dalam sebuah daur kesisteman. Keseluruhan elemen-elemen kesisteman tersebut, hendaklah dirajut di atas basis kenyataan-kenyataan pluralisme dalam masyarakat. Pluralisme tersebut dapat dilihat dari segi-segi sosiologis, struktur masyarakat, struktur etnik, struktur demografi, struktur ideologi, struktur sosio geo-ekonomi dan sebagainya.

Di samping itu untuk mendemokrasikan kehidupan politik harus diadakan perbaikan pada lembaga legislatif. Semua upaya yang dilakukan untuk menjadikan lembaga-lembaga legislatif semakin fungsional, maka yang perlu dibenahi adalah proses atau pelaksanaan pemilihan umum yang harus benar-benar jujur, adil dan transparan, sehingga kehidupan politik memang berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Salah satu komponen pelaksanaan pemilihan umum yang menjadi factor pendukung dalam pelaksanaan pemilihan umum agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah berjalannya tugas-tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Demikian juga halnya panwaslu Kota Pekanbaru yang dapat mendukung lancarnya pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Kota Pekanbaru.

Namun dalam pelaksanaannya panwaslu Kota Pekanbaru tidak luput dari hambatan dan kendala sebagaimana dijelaskan di atas. Walaupun

demikian tugas-tugas dari panwaslu memang harus dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang.

Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh panwaslu Kota Pekanbaru adalah yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat teknis di lapangan, dan juga yang berhubungan dengan masalah financial yang masih terbilang kecil, dan belum sesuai dengan kondisi tugas yang dilakukan oleh panwaslu di lapangan.

Di samping itu panwaslu juga senantiasa melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu memang menjadi perhatian dari pihak pemerintah kota dalam memberikan dukungan finansial yang dibutuhkan oleh panitia pengawas pemilihan umum Kota Pekanbaru, karena tanpa financial memang kinerja dari pihak panwaslu tidak dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan tujuannya.

C. Solusi Yang Dilakukan Oleh Panwaslu Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang

Dalam hal-hal pelanggaran yang dilakukan para pihak yang bersangkutan KPU memberikan;

- 1) Surat edaran yang berhubungan dengan larangan atau teguran kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Menindaklanjuti laporan yang telah masuk ke KPU yang disampaikan oleh panwaslu dengan cara menindak lanjuti isi dari laporan tersebut.

Sedangkan yang dilakukan panwaslu dalam minindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh parpol:

- 1) Menyurati kepada para pihak parpol yang bersangkutan.
- 2) Menghimbau kedia masa dan cetak untuk meminimalisir pelanggaran.

Sedangkan hal-hal yang dilakukan para parpol:

- 1) Melengkapi seluruh yang berhubungan dengan administrasi yang mejadi kewajiban para calon anggota DPR,DPD, dan DPRD tutur Eka Riati calon anggota DPR dari partai hanura.
- 2) Memberikan pelatihan atau arahan terhadap seluruh calon anggota DPR,DPD, dan DPRD yang berhubungan dengan proses sosilisasi.

Sehubungan dengan pelanggaran pemilu yang mana kita ketahui bahwa pada tahun 2014 mendatang kota pekanbaru akan mengadakan pemilihan umum, DPR,DPD dan DPRD telah berjalan dimulai dari pemuktahiran data para calon ataupun daftar pilih, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran tetapi sifatnya hanya dalam administari belum tergolong tindak pidana.

Sejauh ini pelanggaran yang dilakukan para calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan perwakilan rakyat daerah hanya dalam administrasi, yang mana kata bapak Budi candra selaku ketua panwaslu kota pekanbaru, dan juga mengharapkan supaya para calon legislatif tidak membuat pelanggaran yang berat apa lagi sampai ketindak pidana. Agar kita dapat melaksanakan pemilihan umum yang jujur dan adil,bebas, rahasia dan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kota Pekanbaru dalam pemilu legislatif yang akan dilaksanakan Tahun 2014 telah berjalan dimulai dari pemantauan dan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih, persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Pekanbaru, dan proses penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya panwaslu Kota Pekanbaru telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa temuan dan laporan dari masyarakat yang berhubungan dengan persyaratan pencalonan anggota DPRD tetapi sifatnya hanya administrasi dan tidak sampai kepada pelanggaran pidana, sehingga hanya perbaikan saja terhadap kekurangan administrasi yang diperlukan oleh calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh anggota Panwaslu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya antara lain, adalah mengenai sulitnya untuk menertibkan baliho, stiker dan gambar yang telah dipasang oleh para caleg di sepanjang jalan di Kota Pekanbaru, sedangkan waktu kampanye baru akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Kemudian juga masalah kekurangan biaya atau anggaran yang diperuntukkan bagi

Panwaslu, pemerintah kota sering terlambat dalam melakukan pencairan anggaran, dengan demikian pelaksanaan pengawasan sampai ke tingkat kecamatan mengalami kendala, karena para anggota panwas sudah pasti memerlukan anggaran dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

3. Adapun solusi yang dilakukan panwaslu dalam Sehubungan dengan pelanggaran pemilu yang mana kita ketahui bahwa pada tahun 2014 mendatang kota pekanbaru akan mengadakan pemilihan umum, DPR, DPD dan DPRD telah berjalan dimulai dari pemuktahiran data para calon ataupun daftar pemilih, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran tetapi sifatnya hanya dalam administari belum tergolong tindak pidana. Dengan pelanggaran ini pihak panwaslu telah menjalankan tugasnya yaitu dengan cara memberikan peringatan kepada para pihak parpol dalam bentuk:

- a) Mengeluarkan surat edaran yang berupa perintah dan larangan.
- b) Menyurati kepada para pihak parpol yang bersangkutan.
- c) Menghimbau kedia masa dan cetak untuk meminimalisir pelanggaran.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Panwaslu Kota Pekanbaru dan pengawas kecamatan harus saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat dalam memantau jalannya pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Kota

Pekanbaru, sehingga semua bentuk pelanggaran yang terjadi dapat diketahui dengan cepat dan dapat diselesaikan dengan cepat pula.

2. Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pihak yang mendukung dan menyediakan fasilitas financial harus dapat memperhatikan kebutuhan yang diperlukan panwaslu dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga tugas-tugas yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan amanat undang-undang.
3. Agar semua instansi yang bersangkutan dapat bekerja sama dengan semua pihak yang berwajib agar dapat melaksanakan pemilihan yang jujur dan adil supaya dapat menjalankan arti dari isi demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dawam Rahardjo, *Sistem Pemilu, Demokratisasi dan Pembangunan*, Cidesindo, Jakarta, 1996
- Ellydar Chaidir dan Asri Muhammad Saleh, *Ilmu Negara*, Mandiri Press, Pekanbaru, 2002.
- Ganjar Razuni, *Sebuah Koreksi Konstruksi Reformasi Hasil Pemilu 1999*, Unas Press, Jakarta, 2001
- Janedjri M.Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Marsono, *Kepala Daerah Rakyat*, CV. Eka Jaya, Jakarta, 2005.
- Morrison, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Mudji Sutrisno, *Demokrasi Semudah Ucapan*, Kanisius, Yogyakarta, 2000
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2005 *Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Soejono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke Empat

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.

Yanuarius Koli Bau, *Sistem Politik Indonesia*, Global Pustaka Utama,
Yogyakarta, 2003.